

## AKTUALISASI WARGA GLOBAL YANG HUMANIS

**Yudha Pradana<sup>1</sup>, Kokom Komalasari<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Politeknik Negeri Media Kreatif

<sup>2</sup>Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia

[yudha.pradana@polimedia.ac.id](mailto:yudha.pradana@polimedia.ac.id)

---

### ABSTRAK

Perkembangan kehidupan dunia yang dinamis memberikan konsekuensi terhadap kemunculan konsepsi warga global terkait peran, kedudukan, dan partisipasinya. Konteks tersebut juga berhubungan dengan isu-isu global yang terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya tersebut dapat disrespons melalui pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan (PKN). Rumusan yang dikemukakan dalam penulisan artikel ini ialah: 1. Bagaimana konsepsi warga global beserta isu-isu global yang menyertainya? dan 2. Bagaimana PKN dilaksanakan sebagai upaya pembentukan warga global yang humanis? Dalam implementasinya, warga global tidak bisa dilepaskan dari isu-isu global yang akan mempengaruhi persepsinya mengenai kehidupan global. PKN dapat dilaksanakan sebagai wadah bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang toleran untuk menjamin kehidupan bersama yang harmonis dengan implementasi pilar-pilar pendidikan dan mengakomodir kecakapan abad 21 dan diharapkan mampu mengembangkan warga negara dari segi *civic literacy* untuk memiliki kemelekakan terhadap isu-isu yang dinamis, *civic responsibility* untuk memiliki tanggungjawab terhadap hidup bersama yang harmonis, *civic action* untuk memiliki kehendak untuk bertindak dalam menyikapi isu-isu global, *civic engagement* untuk memiliki keterkaitan dengan kehidupan global dan isu-isu terkait, dan *civic values* untuk memiliki kepedulian pada nilai-nilai kemanusiaan.

### Kata kunci:

Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara Global, Warga Negara Humanis, Isu Global

### ABSTRACT

*The formation of the concept of global citizens in terms of their responsibilities, positions, and involvement is impacted by the dynamic evolution of world life. The context is also relevant to universal problems with human ideals. Education, especially civics education, can counteract this endeavor. In order to create compassionate global citizens, two formulations were put out in the composition of this article: 1. What is the conception of global citizens and the corresponding worldwide issues? and 2. How is civic education implemented? Global issues that will influence citizens' perspectives of global living cannot be isolated from in its implementation. Civics can be used as a platform for the growth of understanding human values to maintain a peaceful shared existence. With the implementation of the pillars of education and accommodating 21<sup>st</sup> century skills, is expected to be able to develop citizens in terms of civic literacy to have literacy for dynamic issues, civic responsibility to have responsibility for living together in harmony, civic action to have the will to act in addressing global issues, civic engagement to have a connection with global life and related issues, and civic values to have concern for human values.*

### Keywords:

Civics Education, Global Citizen, Humanist Citizen, Global Issues

## Pendahuluan

Wacana kemanusiaan tentunya tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pendidikan secara umum, dan pendidikan kewarganegaraan (PKn) secara khusus. Kehidupan manusia yang dinamis semakin memperkuat wacana tersebut utamanya yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia. Perkembangan kehidupan manusia tersebut memberikan konsekuensi logis terhadap perkembangan pemikiran pendidikan karena pada dasarnya pendidikan dan kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan, baik secara kerangka konseptual maupun implementasi praksis. Pendidikan yang selalu bertalian dengan proses memanusiakan manusia dan PKn yang mengedepankan pembentukan warga negara yang cerdas dan baik tentunya dapat menjadi sarana pengembangan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan. Karena manusia tidak bisa dilepaskan dari konteks dirinya sendiri dan lingkungannya.

Berbagai isu kemanusiaan dalam kerangka kehidupan dunia yang saling terhubung dapat dikatakan menyangkut hajat hidup bersama dalam hal keharmonisan hidup. Di sisi lain kehidupan dewasa dunia ini dihadapkan pada berbagai ketidakpastian yang turut mempengaruhi kehidupan bersama. Diantara isu kemanusiaan tersebut ialah soal konflik militer dan non-militer dunia, soal kependudukan yang pertumbuhannya bersifat massif, soal kepengungsian yang berkelindan dengan tantangan dalam pewujudan nilai-nilai kemanusiaan, soal kondisi alam yang kualitasnya dianggap mengalami penurunan, serta terkait pemenuhan hak-hak kaum minoritas dan kaum marginal. Isu kemanusiaan tersebut menjadi hal yang cukup penting untuk diangkat dalam konteks kosmopolitan. Sebagaimana konsepsi *One Humanity: Shared Responsibility* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan kita bisa dan harus berbuat lebih baik untuk mengakhiri konflik, meringankan penderitaan, serta mengurangi risiko dan kerentanan (Churruca-Muguruza, 2018). Ditengah kehidupan yang mengglobal dan saling berkaitan, maka konsepsi kehidupan global dapat ditunjang dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Adanya isu-isu terkait kemanusiaan dapat direspon melalui pendidikan. Pendidikan berpotensi untuk kebaikan dalam hal memaksimalkan kapasitas populasi manusia untuk berhubungan secara positif satu sama lain dalam kepentingan kesejahteraan bersama, melalui pendidikan juga dapat diinformasikan tentang keadaan planet bumi dan bagaimana manusia dapat menghormati berbagai lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan (Brock, 2011). Dalam konteks tersebut nampak bahwa pendidikan diharapkan dapat merespon berbagai dinamika kehidupan manusia khususnya untuk kehidupan bersama yang lebih baik dimana pada dasarnya kehidupan manusia tersebut *interconnected* dan *interdependency*. Sebagai *global concern*, pendidikan juga dapat dimaknai sebagai hak semua orang untuk mengembangkan dirinya, martabatnya, dan berpartisipasi dalam pembangunan negara. Pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan merupakan kunci untuk pembangunan berkelanjutan dan perdamaian dan stabilitas didalam dan diantara negara-negara, sehingga setiap orang harus dapat mengambil manfaat dari kesempatan pendidikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar dasar mereka (World Education Forum, 2000).

Oleh karenanya pemikiran *education as global concern* menjadi suatu peluang dalam pengembangan implementasi pendidikan yang bersifat global dan dilaksanakan secara terintegrasi dalam berbagai jalur pendidikan. Hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para pemikir dan praktisi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan apalagi terkait isu-isu global. David Orr menyampaikan perlu adanya perestroika pendidikan terkait pemikiran ulang umum tentang proses dan substansi pendidikan di semua tingkatan, dimulai dengan pengakuan bahwa banyak dari apa

yang salah dengan dunia adalah hasil dari pendidikan yang mengasingkan kita dari kehidupan atas nama dominasi manusia (Brock, 2011). *Education as global concern* juga terkait sebagai respon terhadap kemanusiaan, konteks pendidikan sebagai ruang yang luas untuk kaum termarginalkan, pendidikan dan kebencanaan, serta pemahaman mengenai arus utama yang dislokasi dan disfungsional juga pendidikan untuk tanggungjawab global berhubungan dengan pendidikan interkultural, pendidikan HAM, pendidikan kedamaian, dan literasi kultural (Brock, 2011; Kaivola & Melén-Paaso, 2007). Konteks-konteks tersebut akan berdampak terhadap penyelenggaraan pendidikan baik secara praktis-pedagogis maupun implementasi dalam lingkup lain, seperti pemuatan dalam materi ajar serta penjaminan pelaksanaan pendidikan untuk semua warga negara tanpa terkecuali melalui berbagai saluran pendidikan.

Konsepsi *education as global concern* di sisi lain berkelindan dengan implementasi PKn. Sebagaimana diketahui, PKn tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dalam konteks pembentukan warga negara yang cerdas dan baik. Dalam kajian PKn perkembangan kehidupan manusia yang dinamis menjadikan dirinya bersifat multidimensional dalam artian memiliki peran dan kedudukan selain warga suatu negara juga sebagai warga global. Sudah banyak kajian yang mengupas mengenai warga negara global. Pada intinya warga negara global akan selalu dihadapkan pada hal status dan peran, perasaan, serta praktik dalam kehidupan dunia yang saling terhubung. Di satu sisi warga negara memiliki terikat oleh nilai-nilai dan konsensus kenegaraan negaranya sekaligus di sisi lain warga negara memiliki tuntutan untuk berpartisipasi aktif dalam menjamin kehidupan global yang harmonis dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Terkadang dua hal tersebut dipandang sebagai hal yang kontradiktif dalam artian meliputi kedudukannya dalam kehidupan nasional dan global, namun pada kenyataannya kehidupan global tidak dapat dihindari oleh seorang warga negara apalagi menyangkut kehidupan bersama. Kerangka tersebut pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan isu-isu global yang menuntut partisipasi warga negara untuk berperan aktif dalam mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan yang dikemukakan dalam penulisan artikel ini ialah: 1. Bagaimana konsepsi warga global beserta isu-isu global yang menyertainya? dan 2. Bagaimana PKn dilaksanakan sebagai aktualisasi upaya pembentukan warga global yang humanis? Tujuan penulisan ialah untuk mengetahui: 1. Konsepsi warga negara global beserta isu-isu yang menyertainya, dan 2. Pelaksanaan PKn sebagai aktualisasi upaya pembentukan warga negara global yang humanis.

## Metode

Penelitian ini menggunakan dikategorikan sebagai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia yang didasarkan pada pembangunan gambaran yang kompleks dan holistik, dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan detail dari informan, dan dilakukan dalam latar alami (Cresswell, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi kepustakaan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial (Sugiyono, 2017). Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk mengungkapkan fenomena mengenai warga negara global dan isu-isu global dalam kaitannya dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dikonstruksikan melalui PKn.

Pengumpulan data terkait dengan penjawaban terhadap rumusan masalah dilakukan melalui penelaahan berbagai referensi terkait fokus tulisan yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan dokumen terkait secara tercetak maupun daring. Koding data dalam studi literatur yang dilakukan dengan

mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam bahan bacaan yang telah dikumpulkan serta mempertimbangkan konteks dan pengalaman yakni terkait pelaksanaan warga global berkaitan dengan PKn dan konstruksi warga negara yang humanis. Secara umum, dilakukan pembacaan dan pemahaman mengenai bahan bacaan untuk mengidentifikasi topik dan isu utama yang muncul, penandaan bagian-bagian teks yang berkaitan dengan topik atau isu utama yang telah diidentifikasi, serta pembuatan daftar kode atau label yang berkaitan dengan topik atau isu utama yang telah diidentifikasi. Kemudian dilakukan laporan atau ringkasan yang mencakup hasil analisis, tema, dan pola yang telah diidentifikasi. Kualitas sumber literatur yang digunakan ialah dalam kerangka indeksisasi artikel publikasi serta penggunaan buku sumber yang relevan dengan topik yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsepsi Warga Global dan Isu Global

Warga negara global selalu diidentikan dengan peran dan kedudukan seorang warga negara terkait dengan perkembangan kehidupan dunia. Hal tersebut muncul karena adanya pandangan bahwa kehidupan seseorang tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan dunia yang dinamis karena perkembangan tersebut akan mempengaruhi juga kehidupannya. Ide terkait gagasan tersebut berhubungan dengan upaya mengembangkan beberapa visi komunitas universal umat manusia dan diawali konsepsi dari Diogenes Laertius bahwa dirinya merupakan milik alam semesta itu sendiri (Linklater, 2002; Medina, 2013). Perkembangan selanjutnya terkait juga dengan moral universal sebagai sesama warga dunia. *Moral universalism* tersebut sebagai kombinasi dari pengakuan politik internasionalisme di antara negara-negara dan komitmen moral terhadap kosmopolitanisme yang berpengaruh (Pérez, 2019).

Seiring dengan perkembangan definisi dan maknanya, warga global dapat dilihat dari dua pemaknaan. *Global citizen* dalam makna luas merujuk pada individu yang lebih mengedepankan dan mengutamakan identitas "warga negara global" di atas identitasnya sebagai warga negara komunal, sedangkan pada arti yang lebih sempit hal tersebut membawa makna akan munculnya sikap individu yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan warga negara dunia di atas kepentingan kelompok komunalnya, bahkan di atas kepentingan dirinya (Prayetno, 2017). Warga negara global dapat diartikan sebagai pemahaman akan tanggung jawab warga negara untuk memenuhi persyaratan institusional dan kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat dunia (Sutrisno, 2018). Maka dapat dikatakan bahwa warga global merupakan warga yang terhubung dalam kehidupan global dan terikat oleh nilai-nilai universal yang menuntut peran dan partisipasi dalam penyikapan isu-isu global terkait kedudukannya tersebut.

Konsepsi warga negara global terkait dengan anasir-anasir yang berkenaan dengan kerangka peran dan kedudukan warga negara dalam perkembangan kehidupan dunia. Sejatinya, walaupun seorang individu terikat sebagai seorang warga suatu negara namun dia tidak bisa terlepas dari kenyataan bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat global. Mark Gerzon mengidentifikasi bahwa sejatinya individu-individu merupakan warga global yang dapat ditinjau dari: (1) gen (keturunan), (2) fisik, (3) sosial, (4) ekonomi, (5) lingkungan, (6) teknologi, (7) politik, dan (8) agama (Murdiono, 2018). Dari kacamata tersebut setidaknya dapat dikatakan bahwa walaupun individu memiliki perbedaan-perbedaan dan terikat oleh ketentuan bernegara tetapi sesungguhnya ada aspek-aspek yang menegaskan bahwa mereka ialah sebagai warga global yang pada akhirnya memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan hidup bersama.

Warga global harus mampu menunjukkan peran yang lebih luas melintasi batas-batas

wilayah negara serta terkait dengan perlunya pengembangan afinitas dan empati dalam menghadapi isu-isu global dan memiliki kecenderungan sebagai upaya untuk mendorong warga negara agar memiliki perspektif global dimana sikap, komitmen, dan tanggungjawabnya mampu melintasi batas-batas budaya lokal dan nasional kepada budaya masyarakat global (Murdiono, 2018; Wahab & Sapriya, 2011; Komalasari & Syaifullah, 2009). Maka dapat dikatakan bahwa dengan berbagai perkembangan kehidupan manusia dalam lingkup dunia (global) akan memberikan tuntutan untuk berpartisipasi dalam menyikapi isu-isu terkait dimana isu-isu tersebut berpengaruh dalam tatanan kehidupan terutama yang berkenaan dengan pemenuhan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Untuk menyokong implementasi peran dan kedudukan warga global harus dilakukan pengembangan pemahaman terhadap persepektif global. Merry Merryfield, Elaine Jarchow, dan Sarah Pickert menyampaikan unsur-unsur perspektif global meliputi: (1) kepercayaan dan nilai manusia, (2) sistem global, (3) isu-isu dan masalah global, (4) sejarah global, (5) pemahaman/interaksi lintas budaya, (6) kesadaran pilihan manusia, (7) pengembangan keterampilan evaluasi dan analisis, serta (8) strategi untuk partisipasi dan melibatkan diri (Wahab & Sapriya, 2011). Persepektif tersebut terkait dengan isu global yang menjadi *concern* dari para warga global. Easton menyampaikan empat indikator yang membuat isu menjadi global, yakni: *pertama*, isu memperoleh perhatian dari para elit pembuat kebijakan dan sejumlah besar pemerintah dari suatu negara, *kedua*, isu memperoleh liputan secara terus menerus dalam pers dunia, seperti surat kabar dan majalah, siaran radio, dan tayangan televisi, *ketiga*, isu menjadi subjek studi, penelitian, perdebatan secara serius dan terus menerus oleh kelompok-kelompok ahli dan para ilmuwan di seluruh dunia, dan *keempat*, isu tampak dalam agenda atau perdebatan-perdebatan tentang agenda organisasi-organisasi internasional (Winarno, 2014). Isu-isu global kontemporer memerlukan perhatian khusus dari setiap negara di dunia, dimana isu-isu itu terus berkembang dan berpengaruh besar terhadap perubahan yang terjadi di dunia (Murdiono, 2018).

Carlos Diaz, Massialas, dan Xanthopoulos mengidentifikasi isu-isu global yakni meliputi: hak asasi manusia, pertumbuhan penduduk, pengungsi, lingkungan hidup, sumber energi, kesehatan dan nutrisi, ekonomi global, dan keamanan global (Komalasari & Syaifullah, 2009). Isu global sebagai tema global meliputi: isu keamanan: tradisional dan non-tradisional, isu ekonomi dan perdagangan, isu kemiskinan dan kesenjangan global, isu pembangunan internasional, isu kerjasama kawasan, isu globalisasi dan krisis demokrasi, isu lingkungan hidup: energi dan pemanasan global, isu terorisme global, isu krisis pangan dunia, isu hak asasi manusia, nasionalisme dan konflik etnik, proliferasi senjata nuklir, *global governance* dan tata kelola dunia internasional, korupsi dan *the captured state*, kejahatan perdagangan manusia (*human trafficking*), feminisme dan kesetaraan gender, liberalisasi pendidikan tinggi, isu kejahatan perdagangan narkoba (*drugs trafficking*), dan isu privatisasi air (Winarno, 2014).

Munculnya isu-isu global tersebut memberikan konsekuensi bagi pengembangan pemahaman warga negara global dan tidak terlepas dari persoalan kemanusiaan. Isu global yang terjadi, bahkan dalam lingkup yang lintas batas, menjadi perhatian bagi setiap warga negara dari berbagai penjuru negara apalagi terkait dengan kemanusiaan karena pada dasarnya nilai-nilai kemanusiaan mesti dipromosikan dalam kehidupan yang interkoneksi dan interdependensi. Hal tersebut juga terkait dengan pendidikan sebagai respon kemanusiaan yang menjadi perhatian global sebagai mekanisme kontrol terhadap status quo dan mekanisme seleksi untuk pelayanan ekonomi dan pembangunan ekonomi, berkaitan dengan meningkatkan profil bantuan kemanusiaan di seluruh dunia dan pelaksanaannya melalui pendekatan hak asasi manusia (Brock, 2011). Hal di atas tentu

berdampak bagi pelaksanaan konstruksi pengembangan pemahaman diharapkan dapat turut serta berkontribusi untuk mengembangkan kesadaran terkait isu-isu global khususnya yang berkenaan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

### **Aktualisasi pembentukan warga negara global yang humanis**

Respon terhadap isu-isu global terkait dengan pengembangan warga global yang humanis dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan dapat dimaknai sebagai sarana pengenalan realita dan pembentukan konteks memanusiaikan manusia. Artinya melalui pendidikan dapat dikembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam merespon berbagai isu global terutama berhubungan dengan promosi nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan dunia dapat berlangsung secara harmonis ditengah berbagai keberagaman yang ada. Kerangka yang demikian diwujudkan melalui pendidikan global dan dapat disimplifikasikan melalui PKn yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan global merupakan upaya untuk menanamkan suatu pandangan (*perspective*) tentang dunia dengan memfokuskan bahwa terdapat saling keterkaitan antarbudaya, umat manusia, dan planet bumi yang pada umumnya menekankan pada kemampuan dalam berpikir kritis (*critical thinking skills*) dimana fokus substansinya berasal dari hal-hal mendunia yang semakin bercirikan pluralisme, interpedensi, dan perubahan dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap (*attitudes*) yang diperlukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang sumber daya alamnya semakin menipis dan ditandai oleh keragaman etnis, pluralisme budaya dan semakin saling ketergantungan (Wahab & Sapriya, 2011). Pendidikan global memberikan pemahaman tentang budaya, perbedaan budaya dan juga cara semua budaya berbaaur bersama dan menekankan bahwa kita semua memiliki cita-cita dan tujuan bersama yang sama (Molina & Lattimer, 2013). Jelas dapat dikatakan bahwa pendidikan global terkait dengan pengembangan warga negara terkait dengan kondisi global yang plural dan saling berketergantungan.

Dalam PKn perkembangan global berimplikasi terhadap *concern* dari para pemikir dan praktisi PKn terkait dengan pengembangan kompetensi warga negara sebagai bagian dari kehidupan nasional dan kehidupan global. Sudah sejak lama para pemikir PKn merumuskan mengenai kompetensi warga negara yang berkelindan dengan perkembangan kehidupan global, pun demikian dalam implementasinya oleh para praktisi PKn. Salah satunya ialah mengenai pendidikan kewarganegaraan global. Selama dua dekade terakhir, pendidikan kewarganegaraan global telah diatur dalam kebijakan pendidikan nasional maupun internasional dan dikonstruksi sebagai kerangka pedagogik bagi sekolah pada abad 21 dan merupakan respons pedagogis terhadap masalah, tantangan, dan peluang globalisasi: migrasi, perbedaan budaya, krisis lingkungan, dan daftar masalah sosial global yang terus bertambah (Franch, 2020; Dill, 2012). Konsep pendidikan kewarganegaraan global sering disajikan sebagai hasil dari evolusi sederhana model pedagogis komprehensif yang menggabungkan semua hal positif tujuan dan praktik dari pendidikan multikultural, pendidikan hak asasi manusia, pendidikan perdamaian, lingkungan pendidikan dan sebagainya (Estellés & Fischman, 2020).

Pendidikan kewarganegaraan global terkait dengan pengembangan warga global untuk: (1) menghormati satu sama lain dalam kehidupan global yang saling ketergantungan, (2) terkait isu mengenai keanekaragaman identitas dan budaya, pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan resolusi konflik, serta adanya isu mengenai ketidaksetaraan kekuasaan dan sumber daya (Wahyudin

& Suwirta, 2017). Pendidikan kewarganegaraan global hadir sejalan dengan semakin meningkatnya komunikasi antarbudaya dan mobilitas manusia yang menciptakan tatanan baru di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dimana isu-isu global perlu digali oleh setiap warga negara muda agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang masalah tersebut dan mengambil peran aktif untuk dunia yang lebih baik, serta munculnya dampak negatif globalisasi yang mempersoalkan nilai-nilai lokal kita (Luthfi, Muchtar, Bestari, Walidi, & Prasetyo, 2019).

Pengembangan warga dunia yang humanis tentu tidak terlepas dari konseptualisasi tujuan PKn untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik. Hal tersebut dapat dimaknai sebagai warga negara yang mampu memiliki kompetensi kewarganegaraan untuk berpartisipasi secara aktif dan bermutu dalam penyikapan berbagai isu-isu dunia yang pada kenyataannya berkelindan dengan peran dan kedudukannya sebagai warga negara. Warga negara diharapkan dapat memiliki nilai-nilai kemanusiaan global, dengan bangunan kohesifitas, konektivitas, dan inklusivitas yang diikat oleh kesamaan basis moralitas serta bertumpu pada rasa saling percaya. Kerangka tersebut jika dikontekstualisasikan dengan kondisi Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan tidak bisa dilepaskan dari implementasi PKn. Maka warga negara global yang humanis dalam kacamata Indonesia tetap berdasar pada nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Dalam implementasinya, dapat dikembangkan: (1) tanggung jawab sosial sebagai tingkat kesadaran saling ketergantungan dan kepedulian sosial kepada orang lain, masyarakat dan lingkungan, (2) kompetensi global sebagai kemampuan untuk memiliki pikiran yang terbuka dan secara aktif berusaha memahami norma-norma budaya orang lain dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja secara efektif, (3) keterlibatan dalam kehidupan kewargaan global sebagai tindakan dan atau kecenderungan untuk mengenali masalah-masalah kemasyarakatan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun global dan menanggapiinya melalui tindakan seperti sukarelaan, aktivitas politik, dan partisipasi masyarakat (Murdiono, 2018). Hal tersebut juga berhubungan dengan warga negara yang mampu menghargai, menghormati dan bekerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu (Arif, 2017).

Implikasi lainnya terhadap PKn ialah upaya mewujudkan dan menguatkan peran peserta didik sebagai bagian dari kehidupan global sehingga menuntut partisipasi aktif, *well informed*, mampu berpikir kritis, mampu memecahkan masalah bersama, dan mampu hidup bersama dalam keharmonisan. Kontekstualisasi hal tersebut dalam pelaksanaan PKn dapat meliputi pilar pendidikan *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together*, dan *learning to be*. *Learning to know* yang dapat dimaknai menggabungkan pengetahuan umum yang cukup luas dengan kesempatan untuk bekerja secara mendalam pada sejumlah kecil subjek, *learning to do* yang dapat dimaknai sebagai kompetensi untuk menghadapi banyak situasi dan bekerja dalam tim, *learning to live together* yang dapat dimaknai untuk mengembangkan pemahaman dan apresiasi terhadap orang lain dan saling ketergantungan dalam semangat menghormati nilai-nilai pluralisme, saling pengertian, dan perdamaian, dan *learning to be* yang dapat dimaknai sebagai kemampuan bertindak dengan otonomi yang besar, penilaian, dan tanggung jawab pribadi (Delors, et al., 1996). *Learning to know* merupakan jenis belajar yang tidak terlalu menekankan pada penguasaan struktur pengetahuan

melainkan pada penguasaan alat belajar, *learning to do* bukan hanya keterampilan formal melainkan kompetensi pribadi, kemampuan non fisik dan terkait dengan ekonomi informal bahkan hendaknya mempersiapkan orang agar memiliki sikap inovatif, *learning to live together* dapat memberikan kesadaran bahwa diantara para siswa ada persamaan dan saling ketergantungan walaupun berasal dari berbagai ras, etnis, dan bangsa yang berbeda-beda, *learning to be* mengembangkan manusia seutuhnya, berkepribadian, berekspresi, dan punya komitmen yang kuat secara individu, anggota keluarga dan masyarakat, warga negara yang kreatif (Wahab & Sapriya, 2011).

Empat pilar pendidikan tersebut seyogyanya menjadi *concern* bagi pemerhati pendidikan dan praktisi pendidikan, khususnya bagi para pengajar, dalam mengembangkan potensi peserta didik yang utuh dan dalam memberikan kebermaknaan dalam pembelajaran. Namun secara evaluatif nampaknya hal tersebut belum dilakukan secara optimal karena pembelajaran cenderung hanya mengembangkan pengetahuan dan bersifat *transfer of knowledge* belaka sehingga terkadang pencapaian tujuan pembelajaran dan pengembangan dampak pengiring tidak sepenuhnya optimal. Dalam konteks pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi vokasional, upaya meminimalisir hal tersebut dan penguatan empat pilar pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan studi kasus terlebih hal tersebut saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia untuk diimplementasikan dalam pendidikan vokasi. Upaya tersebut tentunya untuk mengembangkan potensi mahasiswa serta pencapaian tujuan pendidikan vokasional. Terlebih, hal tersebut dapat memberikan kebermaknaan dalam belajar serta mewujudkan pembelajaran yang kontekstual. Kebermaknaan pembelajaran menurut Ausubel terjadi karena dalam praksisnya peserta didik belajar melalui proses penemuan yang kemudian mengaitkannya dengan pengetahuan yang telah dimiliki (Baharuddin & Wahyuni, 2010) dan pembelajaran kontekstual dapat membuka pandangan tentang perlunya pembelajaran yang lebih kreatif, aktif, partisipatif, menggali dan mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan potensi atau kecerdasan orisinialnya, bermakna dan menyenangkan (Komalasari, 2011). Dapat dikatakan empat pilar pendidikan tersebut linear dengan pelaksanaan pembelajaran di pendidikan tinggi vokasional.

Di sisi lain, implementasi PKn dalam kajian warga global tidak bisa lepas dari tuntutan untuk mengembangkan kecakapan abad 21. Kehidupan manusia yang terus berkembang dengan berbagai dinamikanya memberikan konsekuensi logis terhadap pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang harus adaptif terhadap perkembangan tersebut. Ditambah tuntutan masyarakat memberikan implikasi terhadap pemenuhan kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik sebagai warga negara sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian lahirlah istilah keterampilan abad 21 atau *21<sup>st</sup> century skills*. Hal tersebut juga nampak pada PKn yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan untuk mengembangkan kecakapan abad 21. Salah satu implikasinya ialah bagaimana muatan pembelajaran dilaksanakan selain untuk mencapai tujuan instruksional dan pengembangan dampak pengiring juga harus mempromosikan kecakapan tersebut.

Dalam konteks pengajaran mengenai inti pengetahuan, siswa juga harus mempelajari keterampilan penting untuk sukses di dunia saat ini, seperti pemikiran kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi (Partnership for 21st Century Skills, 2009). Salah satu peran utama pendidikan adalah mempersiapkan pekerja masa depan dan warga negara untuk menghadapi tantangan zaman mereka, oleh karena itu pendidikan menjadi kunci untuk kelangsungan hidup ekonomi di abad ke-21 dimana subjek pelajaran inti dan interdisipliner membutuhkan tiga keterampilan mencakup: *learning and innovation skills, information, media, and technology skills*, serta *life and career skills* (Trilling & Fadel, 2009). Jika dikaitkan dengan PKn, komponen yang menjadi muara ialah *learning and innovation skills* terutama berkenaan dengan *critical thinking* dan



*problem solving* yang sejalan dengan visi membentuk warga negara yang cerdas dan baik melalui partisipasi yang bermutu dari warga negara walaupun dilaksanakan dalam konteks pembelajaran. Selain itu komponen tersebut dinilai selaras dengan asumsi bahwa pengembangan siswa sebagai warga negara hipotetik perlu dilakukan secara terstruktur dan sistemik.

Dalam konteks PKn, khususnya pembelajaran PKn di perguruan tinggi, hal tersebut memiliki keterkaitan terutama dalam pencapaian visi PKn untuk membentuk warga negara cerdas dan baik yang dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai dirinya dan lingkungan kehidupannya termasuk dalam konteks global, memperkuat perhatian PKn dalam kajian warga negara global, dan memperkaya muatan materi PKn yang akan diajarkan. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilaksanakan melalui pembelajaran kontekstual dan pembelajaran kooperatif dengan mengedepankan pembelajaran berbasis proyek, berbasis masalah, atau studi kasus dimana tujuannya selain untuk mencapai tujuan instruksional juga dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta pengembangan dampak pengiring lainnya terkait peran dan fungsi PKn. Pembelajaran juga dapat mempromosikan keterampilan abad 21 dengan mengedepankan keterampilan *critical thinking, communication, collaboration, dan creative*. Adanya isu global yang dikaitkan dengan PKn juga diharapkan mampu mengembangkan warga negara dari segi *civic literacy* untuk memiliki kemelekakan terhadap isu-isu yang dinamis, *civic responsibility* untuk memiliki tanggungjawab terhadap hidup bersama yang harmonis, *civic action* untuk memiliki kehendak untuk bertindak dalam menyikapi isu-isu global, *civic engagement* untuk memiliki keterkaitan dengan kehidupan global dan isu-isu terkait, dan *civic values* untuk memiliki kepedulian pada nilai-nilai kemanusiaan.

Mengkonstruksi humanisme dalam PKn setidaknya dapat dilakukan melalui belajar hidup dalam perbedaan, membangun saling percaya dan saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, terbuka dalam berpikir, apresiasi dan interdependensi, serta resolusi konflik dan rekonsiliasi nirkekerasan. Hal tersebut dapat dibangun dalam penyikapan terhadap kondisi dunia yang serba tidak pasti apalagi terkait dengan keberlangsungan hidup yang damai dan adil. Bekal modal sosial bangsa Indonesia juga dapat diwujudkan dalam keseharian yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, memiliki sikap dan keyakinan sebagai bagian dari seluruh umat manusia, serta mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Selain itu hal lain yang dapat dijadikan masukan berarti dalam promosi nilai-nilai kemanusiaan ialah melalui resolusi konflik dan perdamaian. Resolusi konflik dan perdamaian akan memperkuat kompetensi warganegara (*civic competence*) dalam hal keterampilan warganegara (*civic skills*), yang disinergikan dengan pengetahuan dan sikap positif dapat menjadi modal kekuatan untuk menyelesaikan konflik secara damai, demokratis, dan konstruktif. Perlu adanya kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berpikir secara kritis dan analitis secara demokratis yang dapat dilakukan dengan mengedepankan kolaborasi. Pada akhirnya, diharapkan akan memunculkan warga global yang menjunjung tinggi persamaan derajat, penghargaan terhadap hak asasi manusia, nondiskriminasi, solidaritas antarsesama manusia, solidaritas antarbangsa, keadilan, keberadaban dan perdamaian.

Gagasan pendidikan untuk kewarganegaraan global berkenaan dengan kemanusiaan adalah

dengan membayangkan bangsa sebagai komunitas yang beragam dan inklusif sebagai pra-kondisi penting untuk pembaruan demokrasi di dunia yang mengglobal dan pada akhirnya diharapkan dapat: (1) menerima tanggung jawab pribadi dan mengakui pentingnya komitmen sipil, (2) bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah dan mencapai komunitas yang adil, damai dan demokratis, (3) menghormati keragaman antar manusia, menurut jenis kelamin, suku, dan budaya, (4) mengakui bahwa pandangan dunia mereka sendiri dibentuk oleh sejarah pribadi dan masyarakat serta oleh tradisi budaya, (5) menghormati warisan budaya dan melindungi lingkungan, dan (6) mempromosikan solidaritas dan kesetaraan di tingkat nasional dan global.

## Simpulan

Kehidupan dunia yang dinamis dan berjalan cepat memberikan konsekuensi terhadap pengkajian warga global terkait peran, kedudukan, dan partisipasinya dalam kehidupan. Berbagai kehidupan global yang sangat dinamis juga memberikan dampak terhadap promosi nilai-nilai kemanusiaan, karena bagaimanapun berbagai isu global yang terjadi sarat dengan nilai kemanusiaan. Hal tersebut pada akhirnya menuntut adanya warga global yang peka dan mau mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan. Juga terdapat implikasi terhadap penguatan hal tersebut melalui pendidikan dan PKn global sebagai respon untuk mewujudkan warga negara yang cerdas dan baik dengan konteks warga global yang toleran dan saling menghormati dalam kehidupan dunia yang interkoneksi dan interdependensi. Dapat dipahami oleh seorang warga negara dalam hal kedudukan dan perannya sebagai warga dunia yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kehidupannya. Prinsip kemanusiaan yang memandang bahwa sesungguhnya manusia itu sama dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kesempatan yang sama, tidak berat sebelah, atau tidak saling menegasikan merupakan hal yang harus didorong dalam konteks warga global. Kerangka tersebut dapat diimplementasikan dalam PKn yang mengedepankan empat pilar pendidikan berupa *learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be* serta mempromosikan keterampilan abad 21 berupa *learning and innovation skills, information, media, and technology skills, serta life and career skills*. Pada akhirnya konseptualisasi dan kerangka tersebut diharapkan akan memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi warga negara yang humanis.

## Referensi

- Arif, D. B. (2017). Pengembangan Kebijakan Kewargaan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal Civics & Social Studies*, 1(1), 1-12.
- Baharuddin, & Wahyuni, E. N. (2010). *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Brock, C. (2011). *Education as Humanitarian Response*. London: Continuum.
- Churruca-Muguruza, C. (2018). The Changing Context of Humanitarian Action: Key Challenges and Issues. Dalam H.-J. Heintze, & P. Thielbörger (Penyunt.), *International Humanitarian Action*. Berlin: Springer.
- Cresswell, J. (2003). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.

- Delors, J., Al Mufti, I., Amagi, I., Carneiro, R., Chung, F., Geremek, B., et al. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Dill, J. S. (2012). The Moral Education of Global Citizens. *Global Society*, 541–546.
- Estellés, M., & Fischman, G. (2020). Who Needs Global Citizenship: A Review of the Literature on Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, 1-14.
- Franch, S. (2020). Global Citizenship Education: A New ‘Moral Pedagogy’ for The 21st Century? *European Educational Research Journal*, 19(6), 1-19.
- Komalasari, K. (2011). Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peserta Didik SMP di Jabar. *Jurnal MIMBAR*, XXVII(1), 47-55.
- Komalasari, K., & Syaifullah. (2009). *Kewarganegaraan Indonesia: Konsep, Perkembangan, dan Masalah Kontemporer*. Bandung: Laboratorium PKn UPI.
- Linklater, A. (2002). Cosmopolitan Citizenship. Dalam E. F. Isin, & B. Turner (Penyunt.), *Handbook of Citizenship Studies*. London: SAGE Publications.
- Luthfi, Z. F., Muchtar, H., Bestari, P., Waldi, A., & Prasetyo, W. H. (2019). Civic Education: Fostering Global Citizenship among Indonesian Students. *CONVASH*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Molina, S., & Lattimer, H. (2013). Defining Global Education. *Policy Futures in Education*, 11(4), 414-422.
- Murdiono, M. (2018). *Pendidikan Kewarganegaraan Global: Membangun Kompetensi Global Warga Negara Muda*. Yogyakarta: UNY Press.
- Partnership for 21st Century Skills. (2009, December). *P21 Framework Definitions*. Dipetik October 28, 2022, dari ERIC: <https://eric.ed.gov/?id=ED519462>
- Pérez, G. P. (2019). Transformation of the Political Theory: Cosmopolitan Citizenship and Democracy. *Open Journal of Political Science*, 9, 314-348.
- Prayetno. (2017). Warga Negara Global: Tantangan, Peluang dan Tanggung Jawab Bersama. *Jurnal Pusham Unimed*, VII(1), 1-20.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 41-51.
- Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudin, D., & Suwirta, A. (2017). The Curriculum Implementation for Cross-Cultural and Global Citizenship Education in Indonesia Schools. *Educare*, 10(01), 11-22.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS.
- World Education Forum. (2000). *The Dakar Framework for Action: Education for All*. Paris: UNESCO.

